

DAMPAK PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI TERHADAP DAYA SAING PELAJAR DI INDONESIA

Tahniah Tasyirifiah & Anna Fadhila Pitaloka

UIN Sunan Ampel Surabaya

tatatahniah@gmail.com ; fadhila.pitaloka@gmail.com

Abstract

Zoning is a new system promoted by the government as a program that is expected to equalize education in Indonesia. However, in practice the zoning itself is felt to be immature and seems rushed because there are still high disparities between schools in Indonesia which can be seen from the differences in quality, facilities, facilities & infrastructure so that this system is considered unfair. Zoning replaces the National Examination (UN) scores which used to serve as a reference for whether or not students are accepted to continue their education at public schools so that students whose homes are close to public schools don't have to work hard and study competitively because the zoning system allows them to be accepted into public schools. This is seen as reducing the motivation and competitiveness of students in Indonesia because previously one of their motivations in studying was to achieve their dreams of being able to continue their education at their favorite state schools. The data collection in this article uses the Systematic Literature Review method where data is obtained from various books, articles, and journals accessed by the author online.

Keywords: Zoning System, Competitiveness, Students in Indonesia

Abstrak: Zonasi merupakan sistem baru yang diusung oleh pemerintah sebagai salah satu program yang diharapkan dapat meratakan pendidikan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sendiri zonasi dirasa kurang matang dan terkesan terburu-buru sebab masih tingginya kesenjangan antar sekolah di Indonesia yang dapat dilihat dari perbedaan kualitas, fasilitas, sarana & prasarana sehingga sistem ini dinilai tidak adil. Zonasi menggantikan nilai Ujian Nasional (UN) yang dulunya berlaku sebagai acuan diterima atau tidak diterimanya peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dengan begitu peserta didik yang wilayah rumahnya dekat dengan sekolah negeri tak perlu bersusah payah dan belajar dengan kompetitif karena adanya sistem zonasi memungkinkan mereka untuk tetap diterima di sekolah negeri. Hal ini dipandang dapat menurunkan motivasi serta daya saing pelajar di Indonesia sebab dahulu salah satu motivasi mereka dalam belajar ialah untuk meraih impian mereka agar mampu melanjutkan pendidikan di sekolah negeri favorit. Pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan metode Systematic Literature Review dimana data diperoleh dari berbagai buku, artikel, serta jurnal yang diakses penulis secara daring.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, Daya Saing, Pelajar di Indonesia

PENDAHULUAN

Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017 Kemendikbud menjalankan sebuah program baru dalam sistem penerimaan peserta didik yang berganti jenjang pendidikan program tersebut dikenal dengan nama zonasi. Sistem zonasi sendiri ialah proses penerimaan peserta didik yang didasarkan pada zona tempat tinggal murid dengan adanya sistem zonasi maka peserta didik mau tidak mau harus memilih sekolah dengan radius terdekat dari rumahnya dan sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Sistem ini diharap dapat mempermudah pemerintah dalam usahanya untuk meratakan pendidikan di Indonesia.

Namun karena kebijakan zonasi ini dirasa sangat tiba-tiba kebijakan ini mendapat pro dan kontra yang cukup serius di kalangan masyarakat, guru, wali murid, serta para murid. Para peserta didik yang diterima di jalur zonasi memang memiliki jarak tempuh yang lebih dekat dengan sekolah daripada peserta didik di jalur prestasi. Akan tetapi, peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi terbukti memiliki nilai yang lebih rendah serta beragam dibanding peserta didik yang dulunya diterima melewati seleksi prestasi. Hal ini bukan tanpa alasan, adanya sistem zonasi terbukti dapat menurunkan motivasi serta daya saing peserta didik dalam belajar. Dimana sebelum adanya zonasi para peserta didik berlomba-lomba dalam mengejar prestasi serta berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan nilai dalam belajar dikarenakan termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah-sekolah favorit impiannya. Akan tetapi sekarang hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi mengingat sistem zonasi menuntut para peserta didik untuk memilih sekolah terdekat yang termasuk di zona atau wilayah tempat tinggalnya.

Sistem zonasi sangat berhubungan dengan daya saing pelajar di Indonesia. Berbeda dengan Jepang sudah siap menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di Indonesia sendiri sistem zonasi ini masih dirasa belum matang karena masih tingginya kesenjangan kualitas antar sekolah di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun fasilitas dalam sekolah sehingga penerapan sistem zonasi sendiri akan semakin membuat kesenjangan terasa lebih nyata. Dan juga dapat memperlemah daya saing para pelajar di Indonesia karena mereka yang memiliki jarak rumah dekat dengan sekolah akan merasa tanpa bersusah payah asalkan mampu untuk lulus dari pendidikan sebelumnya maka dapat dipastikan akan mendapat melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Berbeda dengan saat UN masih diberlakukan dimana para peserta didik akan berusaha belajar dengan giat agar dapat diterima di sekolah negeri favorit impian mereka.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah *Systematic Literature Review*. *Systematic Literature review* ialah metode penelitian yang meninjau suatu gagasan atau pendapat, penemuan, serta pengetahuan secara kritis dengan maksud untuk menggunakan suatu riset sebagai sarana pengumpulan serta pengevaluasian penelitian yang terkait pada topik tertentu. Selain itu, artikel ini juga menggunakan tinjauan pustaka yakni sumber yang digunakan dalam penyusunannya berasal dari berbagai buku, artikel, serta jurnal yang diakses penulis secara daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Lebih Dekat Sistem Zonasi

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy. Melalui sistem zonasi diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak menurut (Purwanti dkk., 2018). Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020). Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Program zonasi ini menjadi suatu langkah inisiatif dari pihak pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan akses serta kesiapan satuan pendidikan agar dapat memberikan pelayanan yang unggul dengan melakukan pemerataan di semua sekolah yang berada pada

zona atau wilayah yang dirasa berdekatan dengan tempat tinggal para peserta didik. Seperti yang sempat disinggung pada paragraf di atas program zonasi juga bertujuan menghapus label sekolah favorit bersamaan dengan dicabutnya label sekolah buangan. Pemerintah tidak menginginkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan Permendikbud no.44 tahun 2019 zonasi sendiri memiliki tujuan yakni dengan menjamin penerimaan peserta didik baru diadakan secara transparan, objektif, serta akuntabel tanpa adanya perbedaan (diskriminasi) agar mampu mendorong peningkatan serta pemerataan akses layanan pendidikan

Alasan sistem zonasi dikatakan belum layak di terapkan di Indonesia

Dibalik usaha serta maksud baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan sistem zonasi ini sendiri, penulis berpendapat bahwa sistem zonasi ini masih belum terlalu matang dan belum layak diterapkan di Indonesia, beberapa alasan diantaranya ialah:

a. Minimnya Sosialisasi

Kebijakan mengenai zonasi ini diatur lewat Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 dan diterapkan langsung pada tahun yang sama yakni 2017, jarak waktu yang sesingkat ini menyebabkan terjadi gejolak di kalangan masyarakat karena kebijakan ini dirasa terburu-buru. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri melalui bantuan dari tokoh masyarakat, kepala camat, lurah, serta kepala sekolah dirasa belum mampu untuk menjangkau wali murid atau orangtua dari para siswa- siswi yang bersangkutan akibatnya konsep serta tujuan dari sistem zonasi ini kurang dapat dimengerti oleh wali murid dan orangtua dari siswa- siswi yang bersangkutan sehingga mampu memicu kesalahpahaman serta rasa ketidaksiapan para orang tua dalam menerima kebijakan zonasi ini. Ditambah lagi masih banyak kasus dimana sekolah mencoba memanipulasi data utama yang digunakan untuk seleksi pada sistem zonasi ini yakni jarak rumah dan masih terdapat praktik memperjual- belikan kursi sekolah favorit.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Muammar dari pihak sekolah sendiri seperti kepala sekolah serta guru juga masih belum mampu dalam menerangkan secara detail mengenai latar belakang dari diadakannya sistem penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi ini. Kepala sekolah serta guru hanya berpegangan kepada surat edaran yang diterbitkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yang berbentuk Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 serta petunjuk

teknis dari Kepala dinas Pendidikan Kota. Dalam Permendikbud dan petunjuk teknis hanya diterangkan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada tahun 2019.

Masyarakat berpendapat bahwa seharusnya pemerintah pusat lebih gencar dalam mensosialisasikan sistem zonasi secara teknis jauh sebelum sistem ini akan diberlakukan sehingga tujuan serta maksud dari pemerintah dalam menerapkan sistem ini dapat dipahami oleh masyarakat dengan lebih baik. Sosialisasi sistem ini sendiri diharuskan terlaksana dengan baik, terstruktur, masif, serta sistematis supaya tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Pemerintah harus bersinergi dalam melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi ini. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam menyukseskan sosialisasi ini antara lain bersosialisasi dengan semua sekolah negeri, mengadakan rapat komite, bekerja sama dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

b. Tingginya Kesenjangan Kualitas Antarsekolah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan kualitas antar sekolah masih menjadi catatan penting bagi Kemendikbud yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem zonasi. Menurut data untuk tingkat SMP saja hanya 28,73% atau sekitar 99.853 ruang belajar atau kelas yang dapat difungsikan dengan baik sisanya yakni sebanyak 247.739 ruang kelas mengalami berbagai kerusakan baik kerusakan pada level ringan, sedang, berat, hingga total. Selain dari sana dan prasarana yang belum merata dan beberapa diantaranya bahkan kurang layak sumber daya manusia juga perlu menjadi pertimbangan penting dari penerapan sistem zonasi ini. Sumber daya manusia yang dimaksud disini ialah kepala sekolah, guru, serta berbagai tenaga kerja lainnya yang diharapkan dapat menyukseskan program zonasi ini juga dirasa belum memenuhi syarat. Hanya terdapat 49 % guru yang telah mendapatkan sertifikasi, dari data tersebut dapat dilihat bahwa ini belum memenuhi standar yang ditentukan. (Rudi,2018). Ketimpangan sarana prasarana, fasilitas, serta sumber daya manusia antara satu sekolah dengan sekolah lain ini juga dapat dilihat dengan begitu jelas oleh masyarakat hanya dengan melihat aspek pemerataan pendidikan tersebut sehingga memicu terjadi polemik di kalangan masyarakat. Masyarakat sendiri

mampu menilai kualitas pendidikan masih timpang bahkan menyebut sistem zonasi ini tidak adil karena membatasi peserta didik untuk berkembang dan mendapat pengalaman belajar yang lebih baik.

Bicara tentang kualitas sekolah dahulu sebelum ada sistem zonasi para peserta didik diseleksi melalui nilai mereka. Para wali murid berbondong-bondong mendaftarkan putra putrinya untuk masuk ke sekolah favorit. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat sangat peduli terhadap kualitas sekolah serta sejalan dengan survei yang diadakan oleh Andini (2009) dalam surveinya menyatakan bahwa hal pertama yang paling menentukan dalam memilih sekolah adalah kualitas dari sekolah tersebut, soal lokasi atau jarak tempuh dari tempat tinggal merupakan pertimbangan paling akhir. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Amirin (2016:1) juga membuktikan bahwa faktor terpenting dalam memilih sekolah adalah kefavoritan sekolah itu sendiri. Faktor tersebut diatas segala-galanya termasuk mengalahkan faktor penting lainnya seperti fasilitas serta guru dengan diterapkannya sistem zonasi ini maka menghapus kebiasaan masyarakat dan berusaha menghilangkan stigma masyarakat terhadap sekolah favorit itu sendiri. Akan tetapi stigma masyarakat pun hingga kini belum berubah, masyarakat masih meragukan keefektifan dari sistem zonasi ini meskipun Humas Dinas Pendidikan Kota sudah menyatakan bahwa seluruh sekolah sudah memenuhi standar nasional tetapi masyarakat masih belum sepenuhnya percaya terhadap kualitas sekolah setelah diadakannya sistem zonasi ini. GC4 mengungkapkan “dengan diterapkannya sistem zonasi maka dapat membuat semua sekolah menjadi sama. Apabila semua sekolah sama maka dikhawatirkan sekolah tidak termotivasi untuk menjadi favorit atau unggulan.”

Masyarakat juga terbukti masih mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit meskipun label tersebut sudah dihapuskan oleh pemerintah semenjak sistem zonasi diberlakukan. Fakta ini membuktikan bahwa penghapusan julukan sekolah favorit masih belum diterima oleh masyarakat. Stigma ini tidak dapat disalahkan juga mengingat penghapusan label sekolah favorit dengan menggantinya menggunakan sistem zonasi ini tidak disertai dengan adanya peningkatan kualitas sekolah sehingga masyarakat belum siap menerima kebijakan ini. Satu-satunya cara untuk mengubah anggapan atau

persepsi masyarakat ini adalah dengan membuktikan adanya pemerataan sarana, prasarana, fasilitas, kurikulum, serta mutu di tiap- tiap sekolah.

Dampak sistem zonasi terhadap daya saing pelajar di Indonesia

Sistem zonasi dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah kebijakan yang membagi wilayah geografis menjadi zona-zona tertentu, di mana siswa-siswa hanya dapat mendaftar ke sekolah-sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Dampak sistem zonasi terhadap daya saing pelajar di Indonesia dapat bervariasi dan memiliki perspektif yang berbeda. Salah satu dampak terbesar dari penerapan sistem ini ialah zonasi mampu untuk menurunkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia secara signifikan melalui penurunan daya saing serta motivasi belajar para peserta didik. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa dengan diterapkannya sistem ini maka mereka yang tinggal di dekat sekolah negeri tidak perlu berusaha secara maksimal atau bersusah payah agar mampu masuk ke sekolah negeri. Mereka hanya perlu belajar dengan santai asal dapat lulus dan naik kelas. Mereka juga tidak akan merasakan pengalaman bersaing di bidang prestasi maupun nilai dengan pelajar dari seluruh Indonesia untuk memperebutkan bangku sekolah negeri terbaik yang diimpikan. Disinilah poinnya, dimana semangat belajar para peserta didik tidak terlatih untuk bersaing. Hal ini tentunya sangat berbaya mengingat dalam era yang serba modern ini atau biasa disebut masa globalisasi apabila pelajar di Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup maka akan membuat bangsa tertinggal serta semakin tertinggal dan jatuh sebab era globalisasi yang menciptakan konsekuensi dimana semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian. Salah satu contoh kasus nyata peserta didik kehilangan motivasi serta daya saing yang dimiliki ialah ada peserta didik yang menempuh pendidikan di salah satu sekolah dasar favorit di daerah Pekalongan ia telah mengumpulkan prestasi dari berbagai macam perlombaan seperti bernyanyi, adzan, tilawah, adzan, dan lain sebagainya tetapi ia gagal masuk ke SMP favorit impiannya dikarenakan jarak tempuh sekolah yang diinginkan terlampaui jauh akhirnya ia membakar sebanyak 15 piagam penghargaan yang ia miliki karena rasa kekecewaan yang mendalam.

Sistem zonasi juga akan menciptakan kondisi peserta didik yang sangat heterogen atau beragam. Adanya perkumpulan peserta didik yang mempunyai kapasitas akademik yang sangat tinggi ada juga yang mempunyai kapasitas akademik

yang cukup rendah. Mereka nantinya akan dipertemukan dalam satu ruang kelas yang sama untuk belajar. Perbedaan yang sangat signifikan inilah yang akan menjadikan guru berpikir lebih keras serta harus berpikir lebih keras dalam memilih strategi mengajar yang sesuai dengan kondisi ini. Apabila murid yang memiliki kapasitas atau kemampuan akademik yang tinggi harus belajar ulang mengenai teori- teori atau rumus dasar yang sudah lama mereka kuasai maka peserta didik tersebut akan merasa kurang tertantang dan cepat bosan. Hal ini mampu menurunkan daya saing mereka karena tanpa belajar dengan keras pun mereka mampu mendapat nilai yang memuaskan sehingga akan berujung pada rasa berpuas diri dengan kemampuan yang sudah mereka miliki yang nantinya akan menyebabkan sifat tidak mau belajar lebih dan akan cenderung bersikap malas- malasan serta menyepelekan mata pelajaran yang sedang mereka pelajari.

Sistem zonasi ini juga memiliki dampak negatif lain yang berhubungan dengan penurunan daya saing pelajar di Indonesia yakni terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan yang akan semakin menjadi- jadi apabila sistem ini diterapkan. Hal ini bukan tanpa alasan, sekolah-sekolah yang berada di zona-zona dengan daya beli yang lebih tinggi atau dengan lingkungan yang lebih berkembang cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, sekolah-sekolah di zona-zona yang lebih miskin atau terpencil mungkin memiliki sumber daya terbatas dan kualitas pendidikan yang rendah. Para peserta didik di daerah tertinggal pun tidak diberikan kesempatan untuk mendapat sekolah yang lebih baik di daerah lain dengan diterapkan sistem zonasi ini menyebabkan kualitas pendidikan yang semakin terkotak- kotak antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pernyataan ini juga sejalan dengan argumen para guru yang beranggapan bahwa zonasi menghambat sekolah dalam menyaring peserta didik yang berprestasi karena penilaian sistem zonasi berdasarkan jarak bukan prestasi sehingga menyebabkan penurunan kualitas sekolah. Zonasi dapat memperparah kesenjangan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat dan menghambat peluang bagi pelajar dari latar belakang yang kurang mendukung untuk meningkatkan daya saing mereka sebab terbatasnya peluang serta fasilitas yang diperlukan untuk bersaing.

Dan dampak keempat yang berhubungan dengan daya saing pelajar di Indonesia ialah dalam sistem zonasi, kuota penerimaan siswa seringkali ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang berada di zona tertentu. Hal ini dapat menyebabkan

situasi di mana beberapa sekolah mungkin memiliki tingkat penerimaan yang sangat tinggi karena jumlah siswa yang berlomba mendapatkan tempat di sekolah tersebut cukup banyak, sementara sekolah lain mungkin memiliki tingkat penerimaan yang rendah karena jumlah siswa di daerah tersebut sedikit sehingga nantinya akan ada sekolah dengan peserta didik yang cukup banyak karena terletak di daerah padat penduduk dan ada sekolah dengan peserta didik yang sedikit karena terletak di daerah sepi penduduk. Ini dapat terjadi dikarenakan penerapan sistem zonasi tidak disertai dengan adanya pemerataan penduduk. Persaingan dalam zona yang tidak terlalu ketat (sepi penduduk) mampu menurunkan daya saing pelajar di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem zonasi sebagai suatu sistem terobosan baru dalam pendidikan di Indonesia sebenarnya mengusung maksud baik sebagai inovasi baru yang diusung oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun program ini sendiri terasa masih belum matang apabila diterapkan di Indonesia sebab masih tingginya kesenjangan antar sekolah mulai dari sumber daya manusia, sarana serta prasarana, dan fasilitas yang dimiliki sehingga menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Salah satu dari ratusan dampak lainnya yang tidak kalah krusial ialah penurunan daya saing pelajar di Indonesia.

Penurunan daya saing peserta didik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, menurunnya motivasi peserta didik dalam belajar dikarenakan prestasi belajar sudah tidak menjadi patokan utama dalam menerima peserta didik ke sekolah negeri. Kedua, sistem zonasi akan menciptakan kondisi kelas yang sangat heterogen sehingga peserta didik yang memiliki kapasitas akademik yang lebih tinggi akan merasa cepat bosan dan tidak mau belajar lebih mendalam karena mereka bisa mendapat hasil yang memuaskan tanpa belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, kualitas pendidikan akan semakin terkotak-kotak antar wilayah. Mereka yang menetap di area yang tertinggal (terpencil) tidak diberikan kesempatan untuk melakukan mobilitas dengan memilih sekolah yang lebih baik di luar zona mereka sehingga daya saing mereka juga dapat menurun sebab terbatasnya peluang serta fasilitas. Keempat, daerah yang sepi penduduk persaingan tidak akan terlalu ketat sehingga dapat menurunkan daya saing pelajar di Indonesia.

Sebenarnya kebijakan ini masih dapat dilakukan tanpa menurunkan daya saing dari pelajar di Indonesia dengan catatan tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antar satu sekolah dengan sekolah lain dalam artian kualitas serta fasilitas yang diusung oleh setiap sekolah di Indonesia seimbang (tidak timpang) dan disertai dengan sosialisasi dengan semua sekolah negeri, mengadakan rapat komite, bekerja sama dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama agar dapat diterima di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, L. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. *EJOURNAL.UNESA.AC.ID*.
- ARISTA, I. (2021). PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI INDONESIA. *ACADEMIA.EDU*, 12.
- Bintoro, R. F. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMA TAHUN AJARAN 2017/2018 DI KOTA SAMARINDA. *Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1*, 54 .
- Hendrawansyah. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS. *JURNAL KEPENDIDIKAN* .
- Karmila, M. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM . *JURNAL LAIN-BONE.AC.ID*, 11.
- KARTIKA, Y. (2017). PENDIDIKAN YANG BERDAYA SAING. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FKIP UNTIRTA*, 325 .
- Mareta, I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara*, 237- 243.
- MUAMMAR. (2019). PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASIDISEKOLAH DASAR (SD) KOTA MATARAM. *EL-MIDAD: JURNAL PGMI*, 42- 58.
- Nagel, P. J. (2020) . -31 -Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan. *EJURNAL.ITATS*, 36 .
- NANGGALA, A. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2*, 48.
- Pradewi, G. I. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan . *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Volume 4 Nomor 1*, 29-31.
- SILAS, R. E. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SD NEGERI 2 SOPAI TORAJA UTARA. *EJOURNAL. UNSRAT*, 54 .

Widyastuti, R. T. (2020). DAMPAK PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, 12-18 .